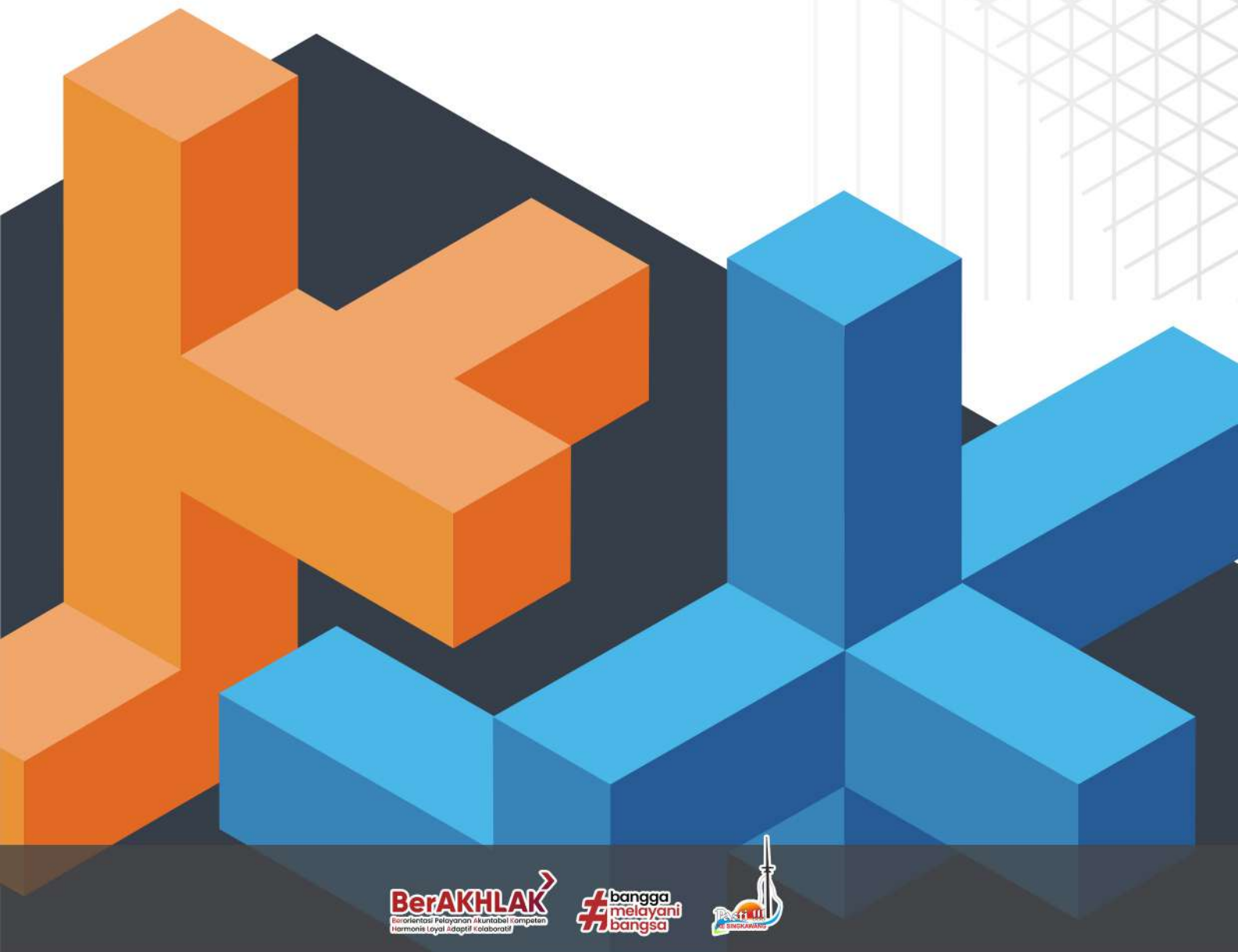




PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG

INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2023



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan | Akuntabel | Kompeten
Harmonis | Loyal | Adaptif | Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Informasi Akuntabilitas Kinerja atau Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Informasi Akuntabilitas Kinerja atau Laporan Kinerja Pemerintah Daerah ini merupakan bagian dari Laporan Penyelegaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) mencakup Perencanaan Kinerja dan Capaian Akuntabilitas Kinerja.

Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen dalam upaya untuk mewujudkan percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan sebagai media pertanggungjawaban serta sarana informasi Pemerintah Kota Singkawang dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pada umumnya.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 adalah laporan pelaksanaan dari masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Singkawang tahun 2023-2026, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis juga memuat aspek keuangan yang secara langsung berkaitan antara dana Pemerintah yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.

Tahun 2023 ini merupakan tahun pertama masa tugas Penjabat Wali Kota Singkawang. Masih banyak hal yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum dan dalam hal pelayanan publik pada khususnya. Namun demikian masih ada juga hal-hal yang belum terwujud sesuai dengan keinginan masyarakat. Hal ini menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Singkawang untuk bekerja lebih keras lagi pada tahun berikutnya.

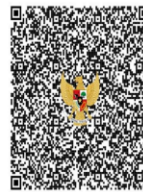
Besar harapan kami bahwa penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 ini dapat menjadi salah satu pemacu dalam memperbaiki kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna. Dengan demikian Pemerintah Kota Singkawang sangat mengharapkan adanya

kritik dan saran yang membangun guna perbaikan penyusunan laporan di tahun mendatang.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik sebagai informasi maupun evaluasi kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Atas keberhasilan Pemerintah Kota Singkawang

Singkawang, 22 Maret 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
PENJABAT WALI KOTA SINGKAWANG

SUMASTRO

INFORMASI AKUNTABILITAS KINERJA

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2023 terhadap target tahun 2023, terhadap capaian tahun-tahun sebelumnya dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya 107,61% dari target. Untuk mendukung capaian kinerja, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan reviu prioritas pembangunan, penekanan strategi maupun reviu terhadap target kinerja sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada akhir RPD 2023-2026.

2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 merupakan perjanjian kinerja awal yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023-2026. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,255
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,27
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,93
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	83,15
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	65,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	53,25
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	685
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	263.625.219.385
	Volume usaha UMKM	792.901.050.097
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,0
	Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,60
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,82
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86,1
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	9,8
	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	25
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,41
	Persentase Penduduk Miskin	4,67
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	84
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	97,97
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	49,92
	Persentase penduduk berakses air minum	49,42
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	93,8
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	53,02
	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	3,73
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	75,45
	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	99,41

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	66,11
	Timbulan sampah terkelola	99
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	96,24
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
	Nilai Indeks RB	70,01
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	3,33
	Indeks Profesionalitas ASN	59,73
	Indeks SAKIP	63,00
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	25,00
	Indeks Inovasi Daerah	58,00
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
	Indeks Integritas	75
Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	6,60
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
	Indeks Risiko Bencana	120

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Singkawang. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi dari masing-masing indikator kinerja selama periode tersebut. Hasil dari perbandingan tersebut merupakan persentase capaian target yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Hasil atas pengukuran kinerja ini dievaluasi untuk mengetahui kegagalan/keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Singkawang.

Dalam rangka melaporkan keberhasilan Tahun 2023, Pemerintah Kota Singkawang telah menetapkan 17 sasaran strategis dengan 42 indikator kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 42 indikator kinerja yang dilaporkan tersebut, sebanyak 19 indikator kinerja atau sebesar 45,24% memiliki capaian melebihi target, 5 indikator kinerja atau sebesar 11,90% sesuai target, 17 indikator kinerja atau sebesar 40,48% tidak mencapai target dan terdapat 1 indikator kinerja atau sebesar 2,38% yang belum dapat diketahui hasilnya karena dalam proses penilaian instansi terkait.

Adapun hasil pengukuran realisasi kinerja Pemerintah Kota Singkawang terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan perjanjian kinerja Tahun 2023, adalah sebagai berikut:

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,252	72,81	99,40
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,27	8,21	99,27
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,93	12,94	100,08
3	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	83,15	91,82	110,43
4	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	65,00	71,00	109,23
5	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	53,25	66,6	125,07
		Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	685	701	102,34
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65	1,67	98,80

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	263.625.219. 385	234.504.37 8.303	88,95
		Volume usaha UMKM	792.901.050. 097	924.086.68 0.097	116,55
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,0	4,77	119,25
		Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,60	4,25	92,39
7	Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,82	11,32	95,77
		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86,1	83,2	96,63
8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	9,8	9,89	100,92
		Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	25	25,63	102,52
9	Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,41	66,60	95,95
		Persentase Penduduk Miskin	4,67	4,7	99,36
10	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	84	88,98	105,93
11	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	97,97	99,2	101,26
		Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	49,92	49,92	100,00
		Persentase penduduk berakses air minum	49,42	50,25	101,68
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	93,80	94,34	100,58

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
12	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	53,02	53,02	100,00
		Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	3,73	3,72	100,26
		Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	75,45	78,98	104,68
		Persentase Kelancaran Lalu Lintas	99,41	99,40	99,99
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	66,11	66,69	100,88
		Timbulan sampah terkelola	99	95,7	96,67
14	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	96,24	96,24	100,00
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	86,71	100,83
		Nilai Indeks RB	70,01	76,49	109,26
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	3,33	3,33	100,00
		Indeks Profesionalitas ASN	59,73	41,49	69,46
		Indeks SAKIP	63,00	62,29	98,87
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	25,00	100,00	400,00
		Indeks Inovasi Daerah	58,00	53,33	91,95
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	n/a	Masih penilaian
		Indeks Integritas	75	74,33	99,11
17	Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	6,60	6,50	98,48

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI	CAPAIAN
18	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00
		Indeks Risiko Bencana	120	155,47	77,19

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan capaian tahun sebelumnya diperlukan untuk mengetahui peningkatan kinerja yang gambarkan sebagaimana berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	72,18	72,46	72,81
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	7,9	8,19	8,21
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,91	12,92	12,94
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	100	100	91,82
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	-	89	71,00
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	49,68	52,72	66,6
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	533,75	681,55	701
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,5	1,61	1,67

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	253.966. 051.385	232.813. 093.303	234.504. 378.303
	Volume usaha UMKM	782.901. 050.097	851.999. 320.097	924.086. 680.097
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	3,68	8,67	4,77
	Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,58	3,22	4,25
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,89	11,82	11,32
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	81,6	85,7	83,2
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	7,62	9,77	9,89
	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	5,39	17,8	25,63
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64,31	68,86	66,60
	Persentase Penduduk Miskin	4,83	4,67	4,7
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	51,764	70,93	88,98
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	91,42	97,91	99,2
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	82,38	64,98	49,92
	Persentase penduduk berakses air minum	40,09	49,08	50,25
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	94,02	94,22	94,34
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	58,67	60,24	53,02
	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	4,06	4,1	3,72
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	71,53	73,52	78,98
	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	98,81	99,4	99,40

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		2021	2022	2023
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	63,85	66,05	66,69
	Timbulan sampah terkelola	51,32	95,68	95,7
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	-	34,23	96,24
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,04	85,62	86,71
	Nilai Indeks RB	60,16	63,37	76,49
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	2,6	2,6	3,33
	Indeks Profesionalitas ASN	n/a	59,73	41,49
	Indeks SAKIP	61,86	62,88	62,29
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100	100,00
	Indeks Inovasi Daerah	70,63	57,18	53,33
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	Belum rilis
	Indeks Integritas	71,3	73,91	74,33
Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	6,48	6,583	6,50
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100
	Indeks Risiko Bencana	155,47	155,47	155,47

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dibandingkan target RPD tahun 2026 sebagaimana table berikut:

Tabel 2.3.4.1
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dibandingkan Target RPD Tahun 2026

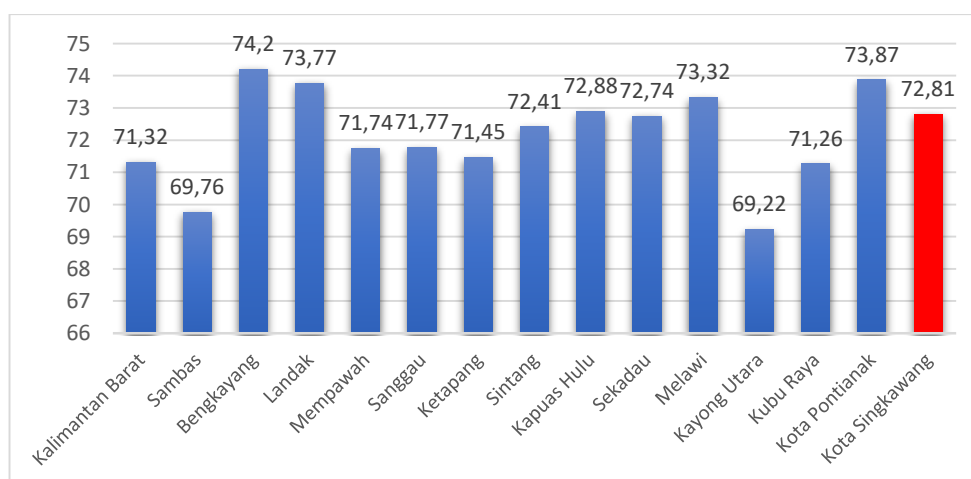
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah 2026	Realiasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	74,63	72,81	97,56
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,51	8,21	96,47
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,96	12,94	99,92
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	84,54	91,82	108,61
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	75	71,00	115,05
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	54,86	66,6	121,40
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	699	701	100,29
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,56	1,67	93,41
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	293.625.219.385	234.504.378.303	79,87
	Volume usaha UMKM	822.901.050.097	924.086.680.097	112,30
	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,15	4,77	114,94
	Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,65	4,25	91,40
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,97	11,32	94,57
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	87,4	83,2	95,19

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah 2026	Realiasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	9,85	9,89	100,41
	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	28	25,63	91,54
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71,06	66,60	93,72
	Persentase Penduduk Miskin	4,16	4,7	92,13
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	87	88,98	102,28
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	97,97	99,2	101,08
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	30,05	49,92	166,12
	Persentase penduduk berakses air minum	50,36	50,25	99,78
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	94,57	94,34	99,76
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	56,41	53,02	93,99
	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	3,64	3,72	102,20
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	81,61	78,98	96,78
	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	99,44	99,40	99,96
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	66,41	66,69	100,42
	Timbulan sampah terkelola	100	95,7	95,70
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	99,2	96,24	97,02
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	86,71	98,53
	Nilai Indeks RB	70,3	76,49	108,81

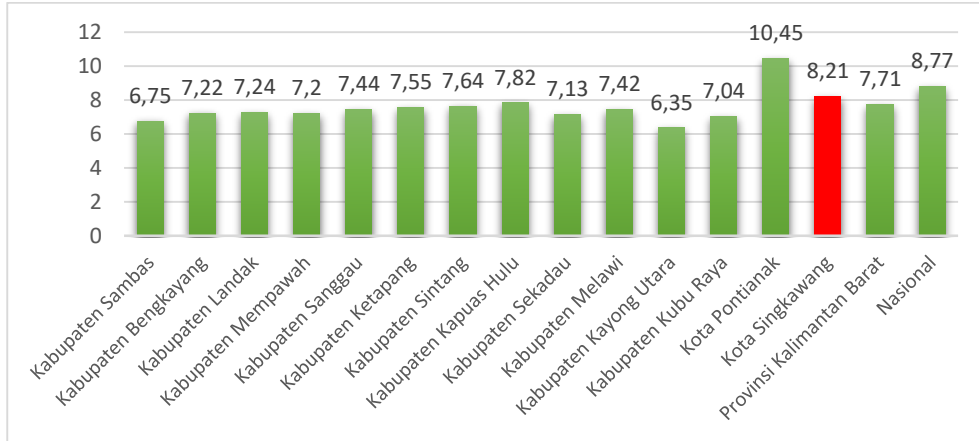
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah 2026	Realiasi 2023	Capaian
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	86,71	98,53
	Nilai Indeks RB	70,3	76,49	108,81
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	3,36	3,33	99,11
	Indeks Profesionalitas ASN	69,14	41,49	60,01
	Indeks SAKIP	64,00	63,00	97,33
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100	100,00	100,00
	Indeks Inovasi Daerah	61	53,33	87,43
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	n/a	n/a
	Indeks Integritas	77,5	74,33	95,91
Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	6,7	6,50	97,01
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00
	Indeks Risiko Bencana	110	155,47	70,75

2.3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Capaian Nasional, Capaian Provinsi dan/atau Capaian Kabupaten/Kota Terdekat (*Benchmark Kinerja*)

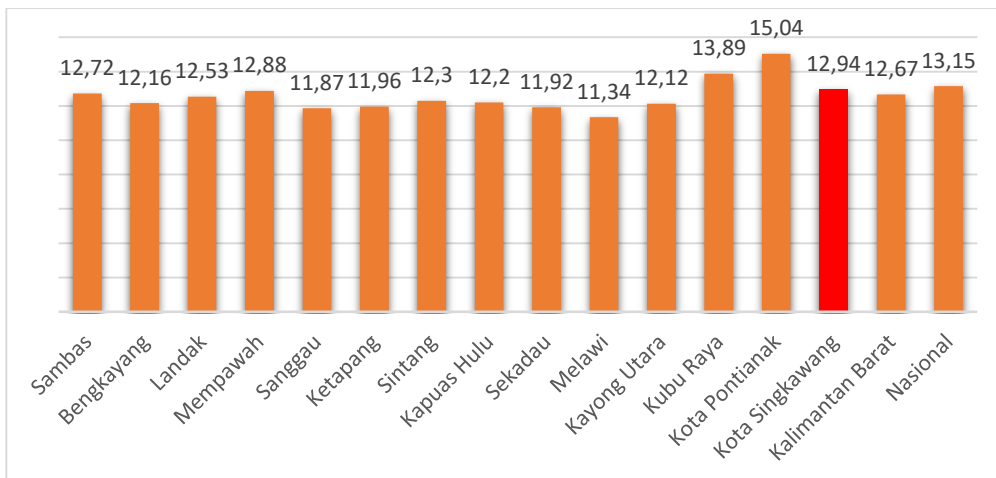
Grafik 2.1 benchmark kinerja capaian AHH Tahun 2023



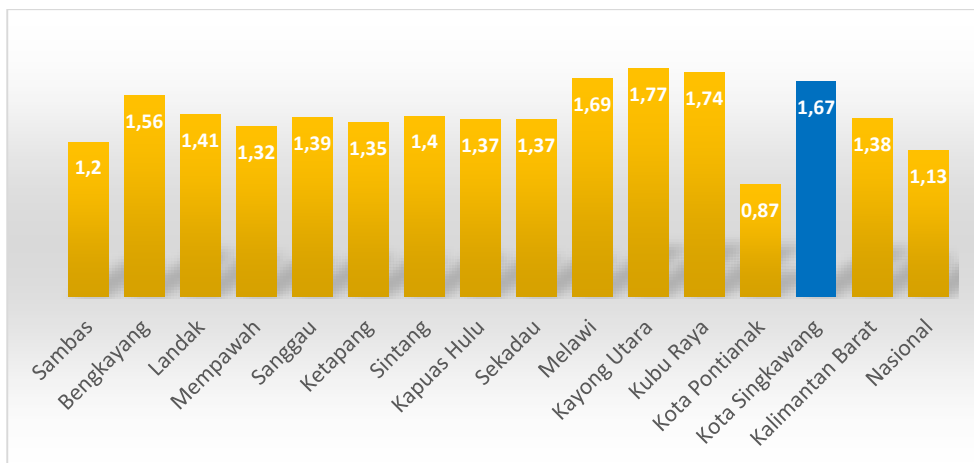
Grafik 2.2 benchmark kinerja capaian Rata2 Lama Sekolah Tahun 2023



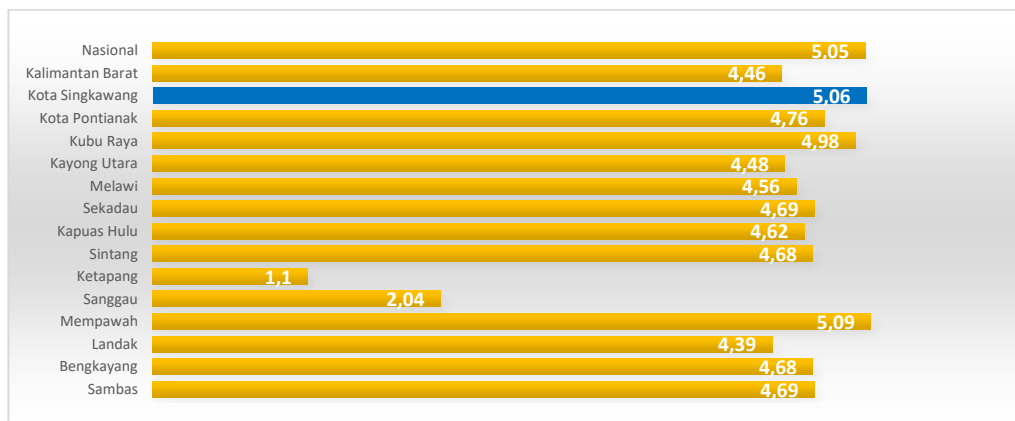
Grafik 2.3 benchmark kinerja Harapan Lama Sekolah Tahun 2023



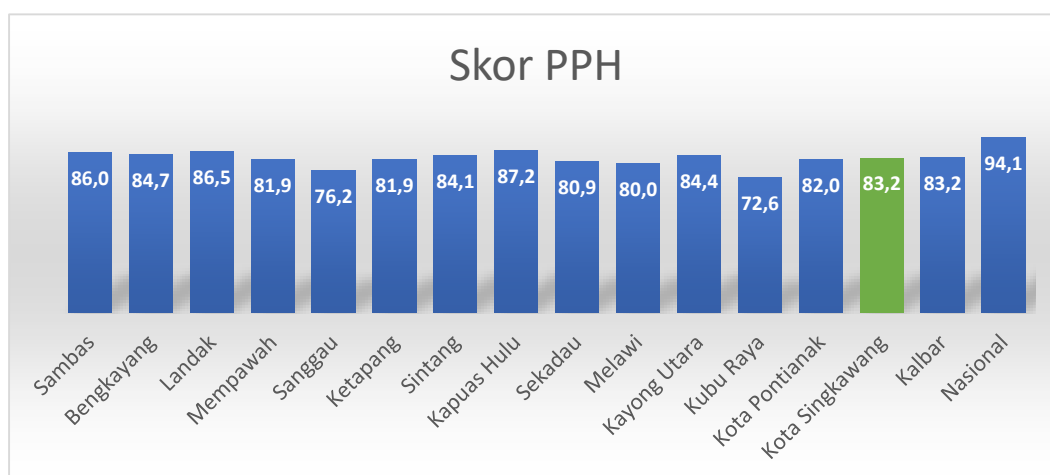
Grafik 2.4 benchmark kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2023



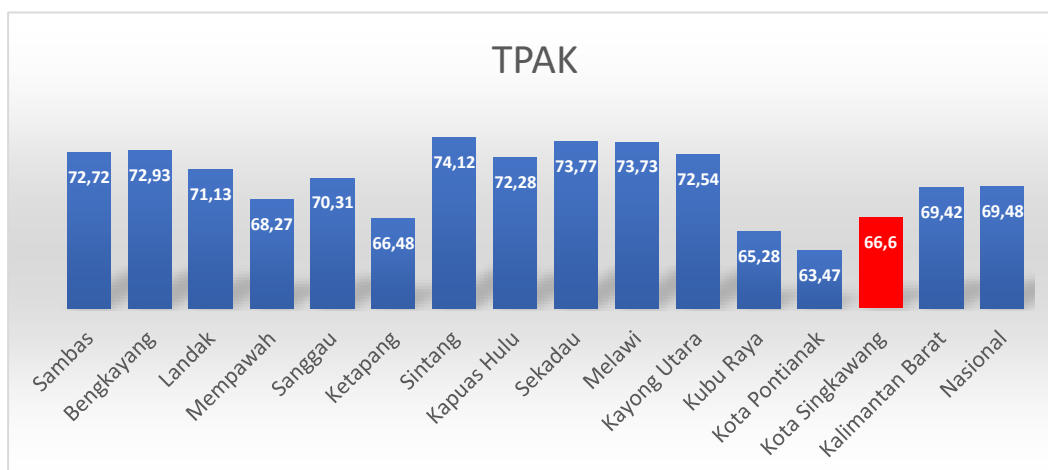
Grafik 2.5 benchmark kinerja Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2023



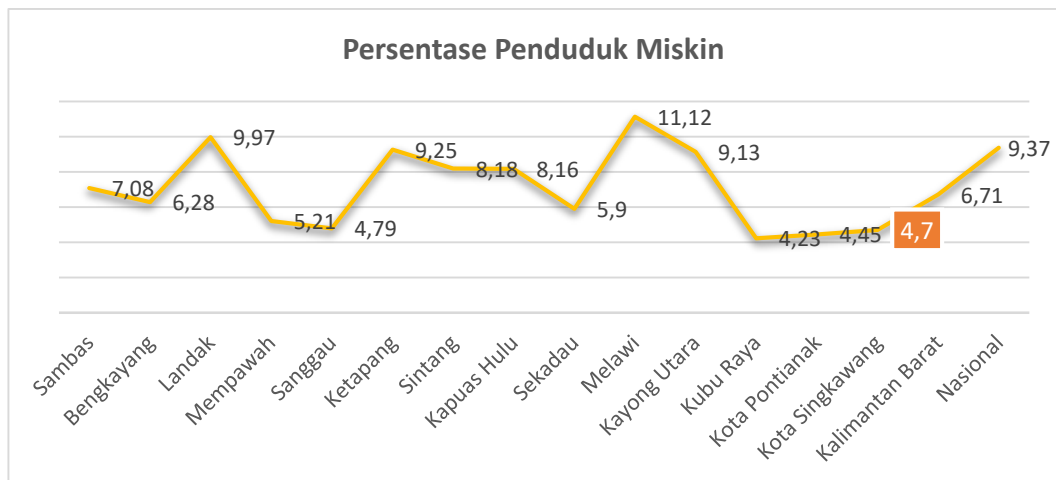
Grafik 2.6 benchmark kinerja Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2023



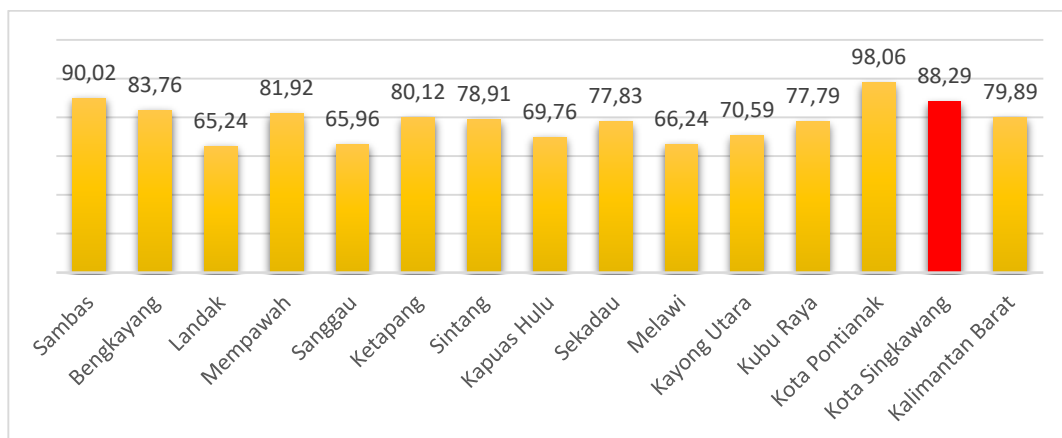
Grafik 2.7 benchmark kinerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2023



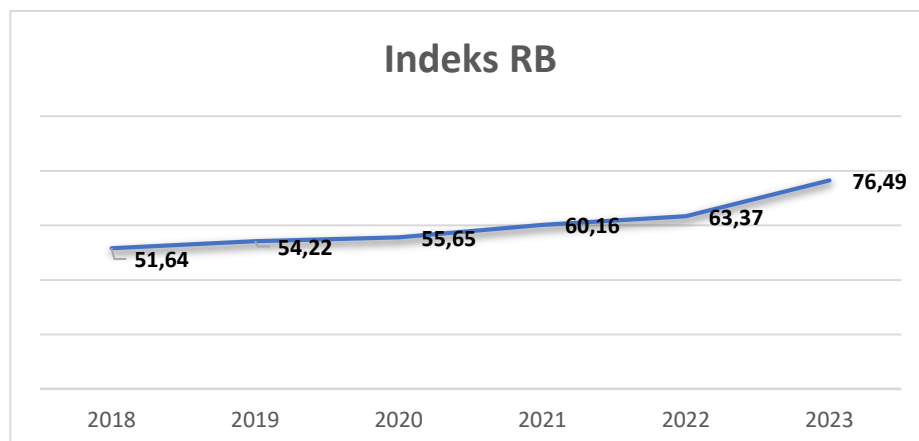
Grafik 2.8 benchmark kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2023



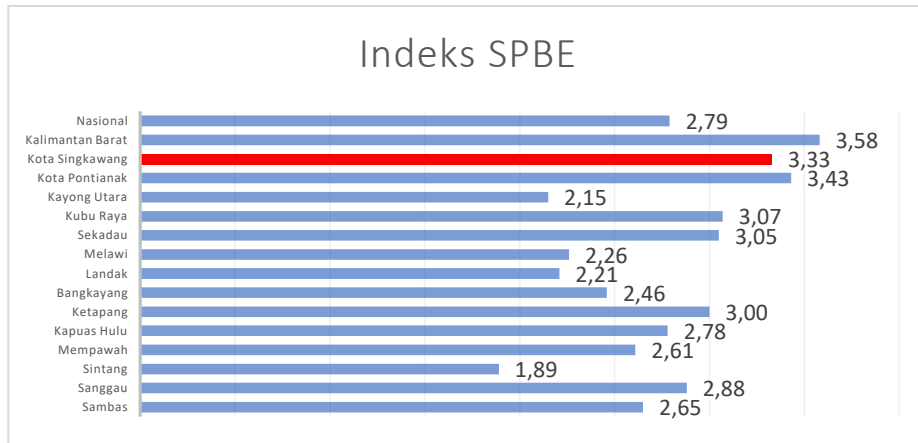
Grafik 2.9 benchmark kinerja Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Layanan Sanitasi Layak Tahun 2023



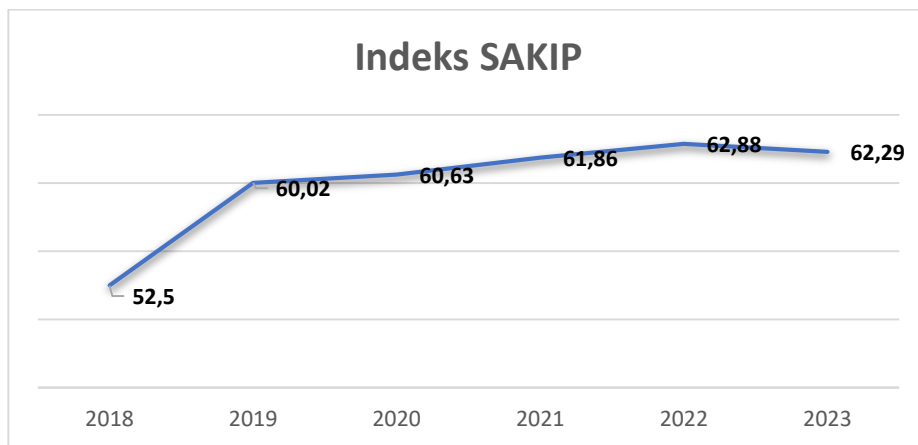
Grafik 2.11 Indeks Refomasi Birokrasi Pemerintah Kota Singkawang



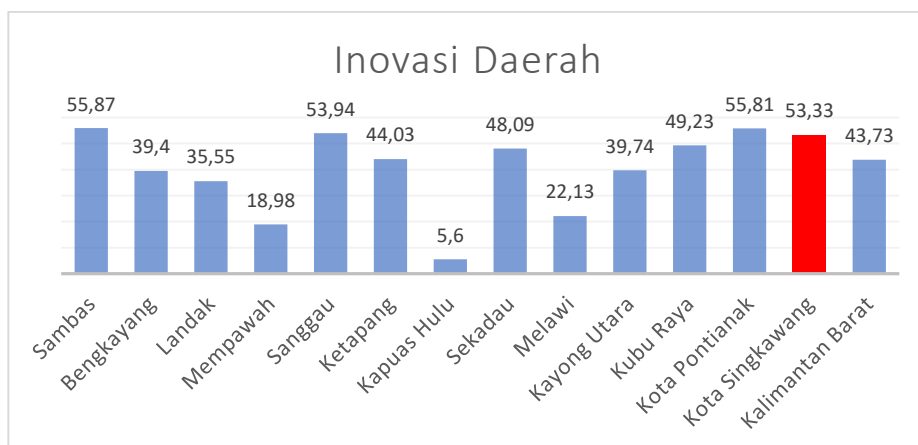
Grafik 2.12 benchmark kinerja Nilai SPBE Tahun 2023



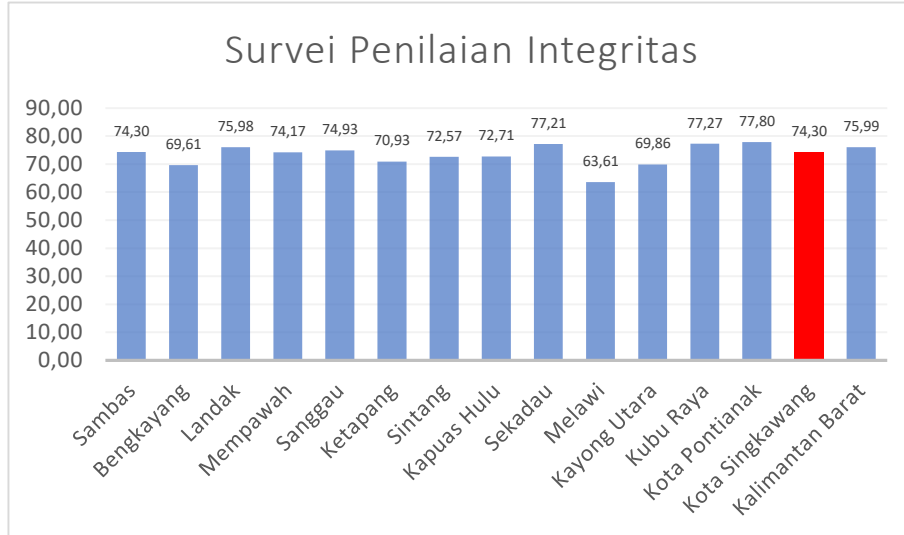
Grafik 2.13 benchmark kinerja Indeks SAKIP



Grafik 2.14 benchmark kinerja Indeks Inovasi Daerah Tahun 2023



Grafik 2.15 benchmark kinerja Indeks Integritas Tahun 2023

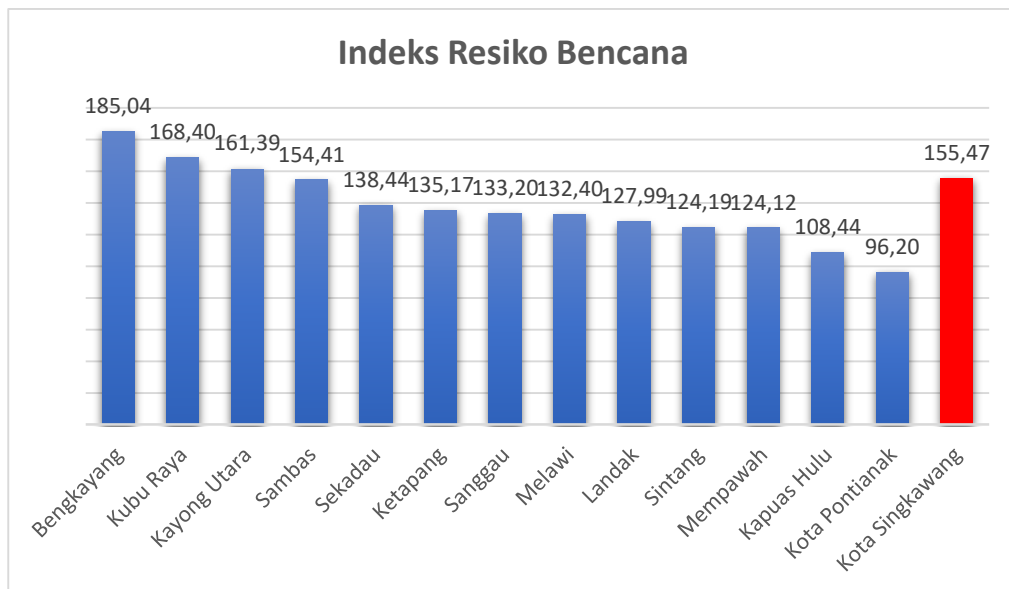


Grafik 2.16 benchmark kinerja Indeks Toleransi Tahun 2023



Sumber : Setara Institute

Grafik 2.17 benchmark kinerja Indeks Resiko Bencana Tahun 2023



2.3.6 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja.

1. Sasaran strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Angka Harapan Hidup capaian 99,44%.

Untuk mengukur IPM dimensi umur panjang dan hidup sehat pada metode lama dilakukan dengan menggunakan indikator angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya. AHH setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana data yang disajikan pada tabel. Saat ini untuk perhitungan IPM dilakukan dengan menggunakan metode baru, yang mana pada dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Umur Hidup Sehat Lahir (UHH). UHH yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2023, UHH telah meningkat sebesar 0,61 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,27 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kota Singkawang adalah 73,81 tahun dan pada tahun 2023 mencapai

74,42 tahun. UHH tahun 2023 meningkat 0,28 tahun (0,38 persen) dibanding tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,22 persen per tahun).

Adapun yang upaya yang dilakukan dalam pencapaian target dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana aksi yang kegiatan
- b. Peningkatan sarana prasarana kesehatan
- c. Sosialisasi kesadaran untuk pemberian ASI eksklusif pada bayi baru lahir
- d. Sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat terhadap gaya hidup sehat.

Selain itu terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya pelayanan pada upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
 - b. Masih kurangnya pemenuhan SDM Kesehatan
2. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pendidikan, dengan indikator angka rata-rata lama sekolah (capaian 99,27%) dan angka harapan lama sekolah (capaian 100,08%).

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun keatas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun, selama periode 2020 hingga 2023, HLS Kota Singkawang rata-rata meningkat 0,10 persen per tahun. HLS 2023 meningkat 0,02 tahun (0,15 persen) dibandingkan 2022, meningkat dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 (0,08 persen).

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Memberikan layanan yang optimal dan maksimal kepada warga sehingga tetap dapat mendapatkan pendidikan sekolah dasar sampai selesai, layanan tersebut berupa fasilitas pendidikan yang memadai, biaya pendidikan gratis, serta menyediakan perlengkapan belajar berupa buku pembelajaran.

- Meningkatkan koordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk memberikan edukasi kepada penduduk tentang pentingnya pendidikan usia dini, dan disertai dengan bantuan pendidikan dari pemerintah kepada setiap layanan pendidikan berupa BOP PAUD
- Evaluasi secara berkala terhadap lembaga pendidikan kesetaraan agar kualitas layanan semakin ditingkatkan sehingga lembaga dapat diakreditasi.
- Melakukan pemetaan terhadap guru sehingga mendapatkan data yang valid, sehingga pemerataan guru ke sekolah menjadi lebih baik dan memperkecil ketimpangan terhadap kekurangan guru di setiap sekolah.

Adapun yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yaitu :

- Validasi data masih belum bisa optimal 100% dikarenakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) masih belum diisi oleh operator sekolah karena terbatasnya sumber daya.
- Angka partisipasi kasar jenjang TK masih rendah (di bawah 50%) dikarenakan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak pada usia dini, serta fasilitas pendukung pada TK Negeri masih minim sehingga masyarakat masih harus perlu mengeluarkan biaya untuk pendidikan di TK Swasta.

3. Sasaran strategis Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya, dengan indikator Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan, capaian 110,43%.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemajuan Kebudayaan, tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, dan situs.

Upaya yang dilakukan dalam pencapaian target dari indikator tersebut adalah sebagai berikut :

- Secara intensif melakukan bimbingan dan koordinasi kepada pegiat kebudayaan Kota Singkawang serta memberikan dukungan terhadap kegiatan kebudayaan dengan cara melaksanakan event kebudayaan Kota Singkawang secara rutin
- Melakukan kegiatan/event kesenian tradisionanl secara intensif di setiap sekolah serta pegiat kesenian di Kota Singkawang
- Melakukan identifikasi terhadap Objek Diduga Cagar Budaya Kota Singkawang secara intensif dan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan tim ahli untuk menetapkan ODCB menjadi Cagar Budaya Kota Singkawang.

4. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga, dengan indikator Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda, capaian 109,23%.

Pada tahun 2023 event olahraga yang diikuti oleh kontingan Kota Singkawang adalah Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Pada event ini terealisasi sebesar 71% dari target sebesar 65%. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan organisasi olahraga dan pemuda.
- Fasilitasi sarana dan prasarana olahraga
- Pembinaan dan pelatihan kepada atlet, pelatih maupun juri atau wasit.
- Pelaksanaan kompetisi atau kejuaraan yang kompetitif.

5. Sasaran strategis Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah yang terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu :

a. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan dengan capaian 125,07%.

TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. TPAK Perempuan pada Tahun 2023 sebesar 66,6 persen, naik 13,88 persen poin dibanding Tahun 2022. Strategi yang

dilakukan Pemerintah Kota Singkawang yaitu dengan memberdayakan perempuan melalui pelatihan khusus serta pelibatan dalam organisasi perempuan dalam usaha mengurangi diskriminasi terhadap gender. Pelatihan tersebut sangat diperlukan terutama bagi perempuan yang sudah berumah tangga agar tetap memiliki aktivitas lain yang dapat membantu perekonomian keluarga.

b. Skor Tingkat Capaian Kota Layanan Anak dengan capaian 125,18%.

Kota Layak Anak (KLA) merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat implementasi Konvensi Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak. Skor tingkat capaian KLA Pemerintah Kota Singkawang setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada Tahun 2023 upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Dukungan Pimpinan Daerah, OPD, Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat dalam melaporkan penerapan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan di Kota Singkawang terutama pada saat proses verifikasi lapangan hybrid yang dilakukan Tim dari Kementerian PPPA yang langsung dihadiri Oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang didampingi Tim Gugus Tugas KLA Kota Singkawang. Komitmen yang luar biasa dari tim GT KLA yang dapat dengan segera melengkapi data verifikasi lapangan yang masih kurang dan harus dilengkapi dalam tenggat waktu 2 hari. Selain itu implementasi partisipasi anak melalui forum anak yang telah didukung oleh OPD terkait dan sinkronisasi data informasi yang disampaikan oleh anak berdasarkan pemahaman dan pengalaman anak yang nyata. Forum Anak menjadi objek verifikasi lapangan tim penilai KLA yang terpisah dari Tim Gugus Tugas KLA sehingga pernyataan kelompok anak benar-benar didasarkan pemahaman dan pengalaman anak, bebas dari intervensi orang dewasa.
- Salah satu kelompok sasaran dalam kegiatan ini yaitu Satuan Pendidikan mengalami perkembangan yang pesat. Hal ini juga didukung dengan adanya program pemerintah pusat

mengembangkan satuan tugas pencegahan kekerasan pada anak disekolah. OPD Pengampu urusan pendidikan dan satuan pendidikan berperan aktif mengangkat isu perlindungan anak di sekolah dengan melibatkan dinas PPPA. Pembinaan Pengembangan Satuan Pendidikan Ramah Anak ditunjang OPD Pengampu Urusan Pendidikan, Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat Peduli Pendidikan di Kota Singkawang. Selain itu, OPD Pengampu Urusan Kesehatan juga telah melakukan pembinaan pada Puskesmas Ramah Anak terkait isu penanganan Kekerasan pada Anak dengan melibatkan Dinas PPPA Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini terus didorong pengembangan Rumah Ibadah Ramah Anak, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang sudah dilakukan pertemuan dan terus dilakukan pembinaan berkesinambungan.

- Pemanfaatan layanan pengaduan secara online melalui SaPA dan pengaduan langsung yang terus disempurnakan dan disosialisasikan dalam setiap kesempatan penyuluhan. Pengembangan SaPA 008 untuk koordinasi penanganan kekerasan dengan OPD Pengampu Urusan pendidikan dan Satuan Pendidikan yang baru diinisiasi pada akhir tahun 2023 dalam kegiatan Seminar SRA dan terus dalam proses pengembangan. Sudah terjalin baiknya penanganan kasus secara berjejaring dengan pihak terkait, dan peningkatan koordinasi internal dalam penanganan dan rujukan kasus terutama dengan bidang RPJS.

c. Laju Pertumbuhan Penduduk dengan capaian 98,80%.

Jumlah penduduk Kota Singkawang tahun 2023 adalah sekitar 246.112 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Singkawang pada tahun 2023 adalah sebesar 1,67 persen. Angka ini lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk pada 10 tahun sebelumnya. Kepadatan penduduk di Kota Singkawang adalah sebesar 488 jiwa/km². Artinya, setiap satu kilometer persegi wilayah Kota Singkawang ditempati oleh

penduduk sebanyak 488 jiwa. Dalam upaya menahan laju pertumbuhan penduduk di Kota Singkawang dilakukan strategi sebagai berikut ;

- Pelaksanaan Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
- Komitmen bersama dari Pimpinan dan Unit Pelaksana hingga dukungan Lintas Sektor, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dalam Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal.

6. Sasaran strategis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, yang terdiri dari 5 (lima) indikator yaitu :

a. Volume Usaha Koperasi, dengan capaian 88,95%.

Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa, serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Pada tahun 2023 terdapat peningkatan sekitar 0,73% dibandingkan tahun 2022. Namun peningkatan tersebut masih belum mencapai nilai tahun 2021. Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- Belum tersedianya regulasi yang mengatur pembagian sektor-sektor usaha koperasi
- Belum optimalnya kualitas SDM pengelola koperasi dalam penyusunan laporan koperasi

Dalam mengatasinya hambatan dan kendala tersebut dilakukan hal sebagai berikut :

- Bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pembuatan regulasi yang mengatur pembagian sector-sektor usaha koperasi.
- Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi
- Meningkatkan jumlah pendamping dalam pendidikan dan latihan perkoperasian.

b. Volume usaha UMKM, dengan capaian 116,55%.

Volume usaha UMKM pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 8,46% dibanding tahun sebelumnya. Hal tersebut berarti telah melewati dari target yang ditetapkan. Berbagai upaya yang dilakukan dalam peningkatan kinerja tersebut yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan jiwa kewirausahaan pada kelompok UMKM
- Pembinaan dan pengembangan kreatifitas kelompok UMKM dalam mengembangkan daya jual produk.
- Pemberian bantuan sarana prasarana pendukung usaha UMKM
- Fasilitasi dan sosialisasi pengurusan NPWP dan perizinan secara online.

c. Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan, dengan capaian 119,25%.

Pertumbuhan PDRB pada tahun 2023, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, nilai pertumbuhannya telah melampaui target. Upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Memberikan kemudahan dalam penerbitan surat rekomendasi tanda daftar gudang.
- Meningkatkan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan.
- Meningkatkan pengawasan distribusi barang perdagangan dan memperkuat kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga barang
- Mendorong pelaku usaha perdagangan untuk berinovasi dalam memperoleh peluang pasar khususnya dalam hal pemasaran produk melalui media elektronik
- Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha perdagangan tentang manajemen usaha.

d. Pertumbuhan PDRB sektor industri, dengan capaian 104.42%.

Pertumbuhan PDRB sektor industri tahun 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,25%. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas daya saing produk IKM melalui berbagai pelatihan untuk peningkatan kualitas produk yang dihasilkan
- Melakukan sosialisasi dalam memperoleh perizinan IKM
- Melaksanakan bimbingan kepala pelaku IKM

7. Sasaran Strategis Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan, yang terdiri 2 (dua) indikator yaitu :

a. Distribusi PDRB sektor Pertanian dan Perikanan, dengan capaian 95,77% :

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Adanya alih fungsi lahan dari lahan produktif beralih fungsi menjadi lahan non produktif
- Sebagian petani padi masih berdifat subsistem, berorientasi jangka pendek untuk pemenuhan kebutuhan sendiri.
- Minat generasi muda sebagai petani cenderung semakin berkurang karena alternative pekerjaan di sector lain.
- Ketergantungan petani, peternak dan nelayan terhadap bantuan pemerintah
- Munculnya penyakit hewan menular strategis / Zoonosis.
- Pengawasan terhadap Pangan Asal Hewan (PAH) belum maksimal.

Dalam mengatasi hambatan atau kendala dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Optimalisasi lahan sawah melalui identifikasi lahan-lahan yang berpotensi, meningkatkan indek pertanaman serta penggunaan bibit unggul.
- Memberikan pelatihan agribisnis serta mengubah mindset agar tidak ketergantungan pada bantuan pemerintah
- Peningkatan kapasitas kelompok melalui diklat-diklat agar poktan kuat, mandiri dan berkembang.
- Mengoptimalkan peran dari Puskeswan dalam rangka mencegah dan mengendalikan Penyakit Hewan Menular Strategis /Zoonosis.

b. Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi, dengan capaian 96,63%

Dalam upaya peningkatan skor PPH Konsumsi dilakukan strategi sebagai berikut :

- Optimalisasi kegiatan pekarangan pangan lestari (P2L) untuk dikembangkan semakin luas
- Pengujian terhadap keamanan pangan melalui rapid test kit
- Pembinaan rutin kepada kelompok wanita tani dalam pemanfaatan pangan lokal

8. Sasaran strategis Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, dengan indikator PAD Sektor Pariwisata (capaian 100,92%) dan Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif (capaian 102,52%).

Pada sasaran ini hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Masih banyak objek destinasi pariwisata yang belum di kelola secara maksimal
- Promosi pariwisata tingkat nasional maupun internasional masih terbatas
- Pengemasan daya tarik wisata yang kurang menarik
- Kualitas pelayanan wisata yang belum baik
- Aksesibilitas pariwisata yang belum memadai.
- Keterbatasan sumber daya untuk dapat memfasilitasi seluruh pelaku ekonomi kreatif

Untuk mencapai target kinerja dilakukan beberapa upaya yaitu :

- Pelaksanaan event daerah
- Penyediaan sarana prasarana pada destinasi pariwisata
- Melakukan promosi pariwisata melalui media sosial, website dan media partner lainnya.
- Melakukan sinkronisasi anggaran kegiatan dan prioritas.

9. Sasaran strategis Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan, dengan indikator sebagai berikut :

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (capaian 95,95%)

Adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Masih terdapat beberapa perusahaan yang belum menyusun dokumen Rencana Tenaga Kerja Mikro sehingga Pemerintah Daerah minim informasi dalam penyusunan kebijakan Rencana Tenaga Kerja Kota Singkawang.
- Hasil dari Perencanaan Tenaga Kerja sebagai bahan informasi pasar kerja belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan melainkan pada tahun berikutnya.
- Kurangnya informasi lowongan kerja dari perusahaan, sehingga pelayanan antar kerja kurang maksimal
- Minimnya pengetahuan pencari kerja dalam menggunakan aplikasi SIAP KERJA
- Belum tersedianya data keanggotaan dari masing masing Asosiasi / Himpunan pengusaha yang ada sehingga belum dapat dilaksanakan sosialisasi regulasi tentang ketenagakerjaan.

Untuk mencapai target kinerja dilakukan beberapa upaya atau strategi yaitu sebagai berikut :

- Pembinaan dan pembuatan Rencana Tenaga Kerja (RTK) mikro di perusahaan dalam merencanakan kebutuhan pekerja dan pengembangan SDMnya kedepan untuk meningkatkan produktivitas di Perusahaan
- Melakukan program pelatihan pencari kerja
- Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja sesuai kebutuhan pasar kerja, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri, yang diharapkan mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Singkawang.
- Memberikan fasilitasi layanan ketenagakerjaan terkait pencegahan perselisihan antara pekerja dengan perusahaan, mediasi dan solusi kesepakatan untuk penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, diluar pengadilan maupun melalui pengadilan hubungan

industrial. Indikasi keberhasilan program ini adalah dilihat dari Perusahaan yang Memenuhi Sarana HI Kota Singkawang yang terdaftar melalui mekanisme wajib lapor ketenagakerjaan.

b. Persentase Penduduk Miskin (capaian 99,36%).

Persentase penduduk miskin setiap tahunnya selalu mengalami penurunan, adapun kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Belum terpadunya database intervensi dalam penanggulangan kemiskinan
- Belum terpadunya perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan
- Belum optimalnya kapasitas SDM dalam penanggulangan kemiskinan
- Masih lemahnya pengawasan pelaksanaan program dalam penanggulangan kemiskinan
- Masih banyaknya keluhan masyarakat terkait pelaksanaan program dan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan

Dalam upaya mencapai target kinerja dilakukan upaya atau strategi sebagai berikut :

- Penyediaan data terpadu kesejahteraan sosial
- Melakukan pemetaan program penurunan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Penyaluran bantuan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat
- Pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah.
- Peningkatan kapasitas SDM pengelola penanggulangan kemiskinan
- Meningkatkan kolaborasi dengan unsur pentahelix dan stakeholders lainnya dalam penanganan kemiskinan
- Pelaksanaan kerja sama penanggulangan kemiskinan yang kolaboratif

10. Sasaran strategis Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan indikator Persentase PPKS yang Tertangani, capaian 105,93%.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Dalam penanganan PPKS terdapat hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Jumlah PPKS yang menjadi sasaran rehabilitasi sosial cenderung mengalami peningkatan
- Koordinasi antar dinas atau stakeholders terkait yang belum optimal
- Jumlah PPKS yang lebih banyak dibanding kemampuan pelayanan yang diberikan

Sebagai upaya peningkatan kinerja dilakukan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Mengaktifkan, membuka layanan jejaring sosial berkoordinasi dengan opd terkait baik vertikal maupun horisontal serta dinas provinsi
- Melibatkan dinas dan stakeholders terkait maupun dunia usaha dan masyarakat yang peduli dengan kesejahteraan sosial
- Peningkatan kualitas PSKS agar penanganan dan pelayanan terhadap PSKS lebih optimal
- Melakukan verifikasi terhadap penerima manfaat bantuan penerima makanan sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran
- Pemberian bantuan kepada kelompok rentan disesuaikan dengan hasil assement dilapangan
- Melakukan MOU dan melakukan pengawasan dalam rehab ODGJ di Rumah Sakit Jiwa

11. Sasaran strategis Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar, yang terdiri 4 (empat) indikator yaitu :

a. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni, dengan capaian 101,26%.

Dalam upaya pencapaian kinerja, masih terdapat hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Belum adanya regulasi daerah terkait petunjuk teknis Rumah Tidak Layak Huni
- Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki RTLH tidak memiliki bukti kepemilikan/alas hak yang sah/menumpang, sehingga tidak bisa diberikan bantuan perbaikan rumah.
- Masih kurangnya swadaya masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun rumah layak dan sehat.

Dalam pencapaian kinerja dilakukan strategi atau kiat dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Mengupayakan dan meningkatkan kerja sama memberikan bantuan perbaikan RTLH melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang bersumber dari APBN, dan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS), Bagian Kesra, Dinas Sosial, yang bersumber dari APBD serta berkolaborasi dengan CSR/Swasta/BAZNAS.
- sosialisasi kepada masyarakat melalui penyebaran informasi pada pertemuan langsung/tidak langsung (media sosial/cetak) terhadap pentingnya membangun rumah yang layak, sehat dan aman secara swadaya sesuai standar keselamatan bangunan dan bagi penghuninya
- Melakukan verifikasi dan pemilahan sesuai kewenangan untuk memudahkan membuat rencana penanganan dan target penuntasan
- Pendataan/updating jumlah Rumah Tangga Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta meningkatkan koordinasi dengan Dinas, Badan yang terkait serta meningkatkan intensitas Peninjauan Lapangan dalam upaya mendapatkan data yang Akurat

- b. Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan, dengan capaian 100%.

Dalam penanganan permukiman kumuh terdapat hambatan dan kendala sebagai berikut :

- Terdapat deliniasi kawasan perumahan dan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota yaitu dengan luas di bawah 10 Ha seluas 13,28 Ha, dengan rencana target Penanganan total luas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 Ha sampai akhir periode Rencana Pembangunan Daerah.
- Penanganan kawasan kumuh melibatkan banyak stakeholders terkait sehingga diperlukan koordinasi yang lebih intens

Dalam pencapaian kinerja dilakukan strategi atau kiat dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu sebagai berikut :

- Kolaborasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Kota Singkawang, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk keterpaduan program secara bertahap dan berkelanjutan.
- Melakukan koordinasi dengan tim KOTAKU dan POKJA PKP dalam perencanaan kegiatan yang berdampak besar terhadap pengurangan luasan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Optimalisasi koordinasi kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP)
- Memfasilitasi pembentukan forum PKP
- Fasilitasi percepatan regulasi bidang sanitasi serta percepatan akses sanitasi
- Pendampingan penggunaan aplikasi SPKP

- c. Persentase penduduk berakses air minum, dengan capaian 101,68%.

Meskipun capaian telah melebihi 100%, masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Jumlah sumber mata air yang terbatas dibandingkan peningkatan jumlah penduduk di kota singkawang

- Pada area jalan/gang perumahan yang sempit terdapat saluran drainase, sehingga pemasangan pipa hanya dapat dilakukan di saluran drainase
- Tidak adanya akses untuk memasang pipa pada bahu jalan

Dalam mengatasi hambatan dan kendala tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- Mencari sumber daya air baru sebagai sumber baku baru
- Meningkatkan koordinasi dengan dinas dan stakeholders terkait khususnya dalam pembangunan jalan, pemasangan tiang listrik dan pagar rumah warga
- Memaksimalkan program pemasangan pipa distribusi

d. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi, dengan capaian 100,58%.

Capaian target melebihi 100%, hal tersebut dilakukan dengan upaya dan strategi sebagai berikut :

- Sosialisasi kepada masyarakat tentang kepedulian hidup sehat dan bersih
- Meningkatkan ketersediaan sanitasi individual dan sanitasi komunal
- Pelaksanaan rehabilitasi sanitasi di lingkungan masyarakat

12. Sasaran strategis Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi, dengan indikator sebagai berikut :

a. Persentase Jalan Mantap, capaian 100%.

Dalam pencapaian kinerja, terdapat hambatan dan kendala yaitu :

- Terbitnya SK Walikota yang baru No. 600.1.7.2/113/PUPR.BMJK TAHUN 2023 dimana ada ruas jalan baru yang masuk sehingga mengakibatkan perubahan jumlah ruas dan perubahan kondisi jalan yang cukup signifikan menurunkan kondisi MANTAP secara keseluruhan
- Tumpang tindih dalam kepemilikan lahan untuk peruntukan jalan
- Ketidaktahuan keberadaan pemilik lahan
- Adanya pemilik lahan yang berada di luar KalBar

Guna mengatasi hambatan dan kendala tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :

- Refocusing anggaran dalam menangani ruas jalan dengan kondisi jalan yang lebih di prioritaskan
- Melakukan koordinasi dengan ATR BPN selaku ketua tim pelaksanaan pengadaan tanah
- Melakukan konsinyasi (penitipan uang ganti rugi) di Pengadilan Negeri.

b. Persentase Genangan/Banjir Kota Singkawang, capaian 100,26%

Dalam pencapaian kinerja ini terdapat hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang lama
- Berkurangnya daerah resapan air akibat dari alih fungsi lahan
- Terdapat bangunan ditepian sungai sehingga mempengaruhi proses pembangunan turap/tebing.

c. Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik, capaian 104,68%.

Capaian target melebihi 100%, hal tersebut dilakukan dengan upaya dan strategi sebagai berikut :

- Proses pengerjaan drainase dengan kondisi yang tidak baik dilakukan lebih awal sebelum musim penghujan
- Normalisasi saluran drainase secara berkala
- Melakukan penertiban bangunan yang menutup saluran drainase
- Optimalisasi survey pendahuluan pekerjaan

d. Persentase Kelancaran Lalu Lintas, capaian 99,99%.

Dalam pencapaian kinerja, terdapat hambatan dan kendala yaitu :

- Belum optimalnya manajemen dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan
- Pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan di jalan masih belum optimal

Sebagai upaya pencapaian kinerja dilakukan hal-hal sebagai berikut :

- Peningkatan dan optimalisasi manajemen lalu lintas
- Pengendalian dan pengawasan lalu lintas secara berkala

- Pembinaan dan pengawasan kepada juru parkir
- Pelaksanaan ANDALALIN yang berkualitas
- Penyediaan dan peremajaan perlengkapan jalan di jalan

13. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola, dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaian 100,88%

Capaian target melebihi 100%, hal tersebut dilakukan dengan upaya dan strategi sebagai berikut :

- Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- Melakukan pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam menindaklanjuti pencemaran air
- Adanya aksi pembersihan sungai dan selokan secara berkala dari sampah-sampah yang dibuang oleh masyarakat.
- Meningkatkan fungsi penegakan aturan dalam pengelolaan lingkungan terutama terkait usaha/ kegiatan yang akan memulai pelaksanaan pembangunan yang harus sesuai dengan tata ruang.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha/ kegiatan dengan memperhatikan dokumen lingkungan yang sudah ditetapkan.
- Rehabilitasi lahan kritis ini mempunyai dampak kedepan dalam peningkatan kualitas lahan, hutan serta kualitas udara.

b. Timbulan Sampah Terkelola, capaian 96,67%.

Dalam pencapaian kinerja, terdapat hambatan dan kendala yaitu :

- Sarana dan prasarana yang belum memadai dan seimbang dengan kebutuhan pengelolaan sampah;
- Kegiatan pengurangan sampah belum optimal dilakukan;
- Terbatasnya SDM untuk kegiatan penanganan dan pengurangan sampah.
- Kurangnya anggaran untuk pengelolaan sampah;
- Pemahaman tentang pengelolaan sampah yang masih lemah ditingkat masyarakat dan stakeholder terkait

Guna mencapai kinerja, dilakukan upaya dan strategi sebagai berikut :

- Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, antara lain penambahan kontainer, kendaraan roda 3 untuk dibagikan kepada Kelurahan menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia
- Melakukan pembinaan pengelolaan sampah pada tingkat Kelurahan, pembentukan dan pembinaan Bank sampah unit (tingkat kelurahan, sekolah, unit kerja, Perusahaan), Kerjasama dengan pihak PLTU melakukan pengelolaan sampah untuk bahan bakar, membangun 1 unit depo sederhana untuk kegiatan pemilahan sampah;
- Melakukan evaluasi sistem angkutan dan pengelolaan sampah termasuk pemberlakuan jasa angkutan khusus.
- Mengusulkan kebutuhan dan penambahan anggaran kepada TAPD dengan menampilkan kebutuhan dan realisasi anggaran, serta melakukan efisiensi untuk pemeliharaan kendaraan yang ada.
- Melakukan sosialisasi terkait kewajiban pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui penyebaran surat edaran terkait Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah, membuat spanduk tentang pembuangan sampah, meningkatkan informasi terkait pengelolaan sampah melalui media sosial.

14. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan, dengan indikator Ketaatan Terhadap RTRW (capaian 100%).

Dalam pencapaian kinerja ketaatan terhadap RTRW, dilakukan upaya dan strategi sebagai berikut :

- Penyusunan regulasi daerah berupa penetapan ruang terbuka hijau
- Dukungan kebijakan dan komitmen dalam proses penetapan rencana rinci tata ruang serta rencana detil tata ruang
- Melakukan sosialisasi dan kajian penertiban pemanfaatan ruang
- Optimalisasi, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang yang selaras dengan kebijakan pusat dan daerah

Namun dalam pencapaian kinerja juga ditemui hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Terjadinya konflik kepentingan antar sektor dalam pemanfaatan ruang
- Penyimpangan dalam pemanfaatan ruang

15. Sasaran strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks Kepuasan Masyarakat, capaian 100,83%

Sebagai upaya pencapaian kinerja dilakukan strategi atau kiat yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- Melakukan pendampingan / pembinaan kepada unit penyelenggara pelayanan publik.
- Melaksanakan pemantauan lapangan atas pelayanan publik
- Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala atas penyelenggaraan pelayanan publik
- Melakukan tindak lanjut dan evaluasi atas hasil survei kepuasan masyarakat.

b. Nilai Indeks Reformasi Birokrasi, capaian 109,26%.

Sebagai upaya pencapaian kinerja dilakukan strategi atau kiat yang dilakukan yaitu sebagai berikut :

- Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi 2023-2024 yang berpedoman pada Road Map RB Nasional
- Melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada unit kerja pengampu indikator/tematik dengan berpedoman pada modul RB yang disusun oleh KEMENPANRB
- Menyelaraskan rencana aksi RB General dan RB Tematik dengan dokumen perencanaan jangka menengah (RPD/RENSTRA) dan dokumen rencana jangka pendek (RKPD/RENJA)
- Memastikan seluruh indikator dalam RB General dan RB Tematik dilaksanakan oleh unit kerja pengampu.
- Melaksanakan rapat evaluasi secara berkala pelaksanaan RB

Namun dalam pencapaian kinerja juga ditemui hambatan dan kendala yaitu sebagai berikut :

- Terdapat rencana aksi yang belum berjalan sesuai target yang ditetapkan
- Pada komponen RB General yaitu indikator indeks kualitas kebijakan dan indeks reformasi hukum belum dilaksanakan penilaian
- Sebagian kecil unit kerja pengampu RB General dan RB Tematik masih dibimbing dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi RB

16. Sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan indikator sebagai berikut :

a. Indeks SPBE, dengan capaian 100%.

Capaian indeks SPBE telah mencapai target, hal tersebut dilakukan dengan upaya sebagai berikut :

- Pemenuhan dan penerapan aspek Teknologi, Informasi dan Komunikasi dengan melakukan pengembangan aplikasi, layanan pusat data fisik maupun *cloud*, layanan jaringan intra dan penggunaan sistem penghubung layanan.
- Penyusunan *Master Plan Smart City* yang merupakan hasil kolaborasi dan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Smart City sebagai guiding dalam pembangunan Kota Singkawang berbasis teknokrasi dan kota cerdas.
- Penggunaan TTE sebagai pengamanan informasi perangkat daerah.

Selain itu terdapat hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja tersebut yaitu sebagai berikut :

- Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik (PPID) pada perangkat daerah masih belum berjalan secara optimal
- Bahasa pemrograman yang terus berkembang dengan berbagai versi

- Sering terjadi gangguan pada sistem informasi seperti *hacker* dan *bug* pada website.
- Pemenuhan prinsip Satu Data Indonesia (SDI) yang masih belum dapat dipahami dan dipenuhi oleh perangkat daerah.
- Terbatasnya SDM pengelola TIK terutama dalam pengelolaan keamanan informasi.

b. Indeks Profesionalitas ASN, dengan capaian 69,46%.

Capaian indeks profesionalitas ASN masih belum mencapai target, adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Kesalahan dalam pengisian capaian dan target pada indikator pengembangan dan perencanaan kompetensi pegawai
- Pelaksanaan mutasi ASN harus melalui proses yang ditetapkan BKN sehingga terdapat proses yang memerlukan koordinasi ke BKN Kanreg V Jakarta.

Dalam pencapaian target dilakukan upaya yaitu sebagai berikut :

- Pemanfaatan digitalisasi dalam proses kepegawaian
- Pembinaan pegawai yang dilakukan melalui zoom meeting
- Pengisian jabatan fungsional melalui pembukaan formasi CPNS dan P3K yang disesuaikan kebutuhan
- Meningkatkan jumlah PNS yang melakukan peningkatan jenjang pendidikan tinggi
- Pengembangan kompetensi pegawai melalui diklat teknis/fungsional.

c. Indeks SAKIP, dengan capaian 98,87%.

Capaian indeks SAKIP masih belum mencapai target belum mencapai target, adapun hambatan atau kendala dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :

- Kualitas RPD yang menurun dibanding tahun sebelumnya sehingga mengakibatkan penurunan nilai komponen perencanaan.
- Terdapat ketidakselarasan dokumen perencanaan baik level Pemda maupun level Perangkat Daerah

- Penjenjangan kinerja yang disusun belum sesuai dengan PERMENPANRB Nomor 89 Tahun 2021
- Pengumpulan dan pengukuran kinerja masih dilakukan secara manual
- Crosscutting kinerja yang disusun belum efektif dalam pencapaian kinerja
- Pengukuran kinerja individu masih belum terlihat keterkaitan dalam mengawal capaian kinerja outcome
- Belum terdapat reward and punishment, penentuan mutasi dan rotasi pegawai serta penilaian talent pool yang digunakan dalam pengukuran kinerja
- Benchmark kinerja yang disajikan masih belum dilakukan di semua indikator yang bersifat makro
- Informasi dalam pelaporan kinerja masih belum sempurna
- Belum dilakukan pemantuan atas tindak lanjut PD atas hasil evaluasi internal secara berkala
- Evaluasi internal belum memanfaatkan teknologi informasi.

Dalam pencapaian target dilakukan upaya yaitu sebagai berikut :

- Menyusun rencana aksi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP
- Melakukan perubahan pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Perangkat Daerah
- Melakukan reviu dan perubahan pada Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
- Melakukan pemanfaatan aplikasi E-SAKIP Provinsi Kalimantan Barat melalui Perjanjian Kerja Sama antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang
- Menyajikan data benchmark kinerja dengan membandingkan realisasi nasional maupun se Kalbar atas indikator yang bersifat makro pada laporan kinerja.

d. Persentase implementasi rencana kelitbangan

Capaian kinerja dari implementasi rencana kelitbangan dapat tercapai 400%, adapun strategi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Penguatan kerjasama antar pemerintahan daerah, perguruan tinggi & lembaga lainnya, baik dalam aspek substansi pelaksana kelitbangan, aspek penguatan SDM & pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan.
- Pemantapan komitmen pimpinan dan para pemangku kepentingan untuk memaksimalkan peran dan fungsi litbang dalam penyelenggaraan pembangunan.
- Memaksimalkan fungsi litbang sebagai "*Think-tank*" yang kritis dalam menjawab permasalahan yang berkembang di daerah.

e. Indeks Inovasi Daerah, dengan capaian 91,95%.

Dalam pencapaian kinerja indeks inovasi daerah, terdapat hambatan atau kendala yaitu sebagai berikut :

- Masih rendahnya tingkat invensi dan difusi inovasi dan teknologi di tingkat pemerintah maupun masyarakat
- Kurangnya kesadaran akan pentingnya inovasi sebagai sarana untuk memudahkan pekerjaan dan meningkatkan efisiensi kinerja.

Sebagai upaya dalam mencapai kinerja dimaksud, dilakukan strategi atau kiat yang dilakukan yaitu :

- Memaksimalkan penerapan Inovasi Daerah
- Mendorong penciptaan dan penerapan inovasi di setiap Perangkat Daerah melalui pemberian reward dan insentif oleh Kepala Daerah.
- Menyelenggarakan kegiatan kompetisi penciptaan dan penerapan inovasi yang diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah dan Masyarakat.

f. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, dengan capaian belum diketahui.

Dalam upaya mencapai opini WTP pada laporan keuangan, dilakukan strategi atau kiat yaitu sebagai berikut :

- Penguatan komitmen dari seluruh perangkat daerah dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
 - Penyusunan dan pengesahaan APBD yang selalu tepat waktu.
 - Pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan SKPD yang optimal.
 - Penyajian laporan keuangan sesuai standar Akuntansi Pemerintah.
 - Pendataan ulang kepada wajib pajak atau intensifikasi.
- g. Indeks Integritas, dengan capaian 99,11%.

Dalam pencapaian kinerja indeks integritas, terdapat hambatan atau kendala yaitu sebagai berikut :

- Belum seluruh ASN memahami dan melaksanakan implementasi SPIP sebagai bagian dari pengendalian intern pada Perangkat Daerah
- Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan materil yang mengakibatkan kerugian daerah masih lambat dalam progres penyelesaiannya, dikarenakan ada yang sudah tidak diketahui keberadaannya, ASN yang sudah pensiun dan ada juga yang sudah meninggal dunia.
- Adanya tugas tambahan di luar Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan pemeriksaan yang jadwalnya telah disusun dalam PKPT.

Sebagai upaya pencapaian kinerja dilakukan hal sebagai berikut :

- Konsistensi dan komitmen pimpinan terhadap penyelenggaraan SPIP;
- Konsistensi komitmen bersama dari seluruh ASN Inspektorat Kota Singkawang untuk mempertahankan Level Maturitas SPIP sesuai dengan tugas dan fungsi yang diembannya
- Pelaksanaan sosialisasi secara terus menerus terkait penyelenggaraan SPIP kepada Perangkat Daerah;
- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Maturitas SPIP pada perangkat daerah yang dilakukan secara berkala;
- Menyusun rencana aksi atas tindak lanjut hasil evaluasi SPIP;

- Melakukan self assessment secara berkala untuk menjaga dan memelihara Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Level 3;
- Dalam pengendalian intern, salah satunya dengan mengimplementasikan strategi dalam pelaksanaan program/kegiatan yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mempertahankan Opini WTP;
- Menyusun perencanaan pengawasan yang dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis prioritas dan risiko yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- Reviu dokumen perencanaan secara berkala melalui Sistem e-Sakip;
- Pendampingan dan konsultasi kepada Perangkat Daerah terkait manajemen risiko, pengendalian intern, tata kelola terhadap Perangkat Daerah serta yang beresiko/ menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seperti probity audit, klinik konsultasi baik Dana BOS maupun PBJ;
- Penguatan aplikasi Whistleblowing System (WBS) terkait pengaduan sebagai bentuk pengendalian terhadap risiko yang kemungkinan muncul;
- Peningkatan kompetensi Kapabilitas APIP baik secara luring maupun daring;
- Pro aktif dalam mencari diklat kompetensi yang dilaksanakan secara daring/online;
- Melaksanakan program pelatihan mandiri dikantor dengan narasumber dari para aparatur pemeriksa yang telah mengikuti diklat dan bimbingan teknis terkait materi pengawasan yang dilakukan setiap bulan;
- Menyusun rencana aksi atas tindak lanjut hasil evaluasi Kapabilitas APIP terhadap Area of Improvement (AoI);
- Menyusun Risk Register Fraud untuk meminimalisir terjadinya risiko fraud; dan
- Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) secara berkala.

17. Sasaran strategis Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik, dengan indikator Indeks Toleransi (capaian 98,48%).

Kota toleran adalah kota yang memiliki visi dan rencana pembangunan inklusif, regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, kepemimpinan yang progresif bagi praktik dan promosi toleransi, tingkat intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan rendah, dan upaya berkelanjutan dalam mengelola keberagaman dan inklusi sosial. Sedangkan Indeks Kota Toleransi (IKT) adalah studi pengukuran kinerja kota, meliputi pemerintah kota dan elemen masyarakat dalam mengelola keberagaman, toleransi dan inklusi sosial. Pengukuran IKT mengombinasikan paradigma hak konstitusional warga sesuai jaminan konstitusi, hak asasi manusia sesuai standar hukum HAM internasional dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Capaian indeks toleransi secara target belum mencapai target, akan tetapi secara peringkat Kota Singkawang masih kokoh di peringkat pertama sebagai kota paling toleran. Adapun upaya yang dilakukan dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

- Menempatkan visi toleransi sebagai ruh dalam pemajuan toleransi dalam dokumen perencanaan daerah.
- Menempatkan generasi muda sebagai ujung tombak dalam menjaga kontinuitas tata kelola keberagaman yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai pancasila.
- Keberadaan regulasi daerah yang secara nyata memberikan kontribusi dan akselerasi bagi pemajuan toleransi di Kota Singkawang.
- Melakukan berbagai inisiatif, terobosan, dan kolaborasi oleh elemen pemerintah kota dan masyarakat.

18. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan indikator sebagai berikut :

a. Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum, capaian 100%

Persentase ketentraman dan ketertiban umum mencapai target kinerja, adapun upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi secara berkala dengan melibatkan perangkat daerah terkait guna efektivitas penegakan PERDA ataupun PERKADA.
 - Optimalisasi PPNS yang ada pada Satpol PP
 - Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelanggaran PERDA
 - Melakukan sosialisasi kebijakan
- b. Indeks Risiko Bencana, capaian 77,19%
- Capaian kinerja indeks resiko bencana belum mencapai target, adapun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja yaitu sebagai berikut :
- Terbatasnya jumlah personel dalam pengelolaan bencana
 - Minimnya diklat pengelolaan resiko bencana
 - Evaluasi terhadap kebencanaan yang masih kurang
 - Belum terbangunnya komunikasi kebencanaan yang efektif secara terpadu dan terintegrasi.

2.3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.7
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dibandingkan dengan Capaian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,25	72,81	99,40	48.526.507.162	45.692.285.050	94,16	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			99,40	% Capaian Anggaran		94,16	n/a
Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,27	8,21	99,27	100.872.381.990	99.825.419.653	98,96	
	Angka Harapan Lama Sekolah	12,93	12,94	100,08				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			99,68	% Capaian Anggaran		98,96	n/a
Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	83,15	91,82	110,43	2.125.278.800	2.104.805.071	99,04	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			110,43	% Capaian Anggaran		99,04	11,39
Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	65,00	71,00	109,23	1.454.994.107	1.435.433.759	98,66	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			109,23	% Capaian Anggaran		98,66	10,58

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	53,25	66,6	125,07	4.240.474.550	3.921.443.020	92,48	
	Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	685	701	102,34				
	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65	1,67	101,21				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			109,54		% Capaian Anggaran	92,48	17,06
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	263.625.219.385	234.504.378.303	88,95	5.297.235.908	5.078.248.408	95,87	
	Volume usaha UMKM	792.901.050.097	924.086.680.097	116,55				
	Volume usaha perdagangan	1.458.240.576.000	1.839.732.800.000	126,16				
	Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,60	4,25	92,39				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			104,29				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,82	11,32	95,77	7.872.600.490	7.739.002.603	98,30	
	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86,1	83,2	96,63				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			96,20	% Capaian Anggaran		98,30	n/a
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	9,8	9,89	100,92	1.364.531.481	1.358.480.276	99,56	
	Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	25	25,63	102,52				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			101,72	% Capaian Anggaran		99,56	2,16
Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,41	66,60	95,95	2.791.151.544	2.580.885.821	92,47	
	Persentase Penduduk Miskin	4,67	4,7	99,36				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			97,66	% Capaian Anggaran		92,47	n/a
Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	84	88,98	105,93	928.173.056	883.143.447	95,15	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			105,93	% Capaian Anggaran		95,15	10,78

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	97,97	99,2	101,26	18.654.366.549	17.925.832.462	96,09	
	Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	49,92	49,92	100,00				
	Persentase penduduk berakses air minum	49,42	50,25	101,68				
	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	93,80	94,34	100,58				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			100,88				
Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	53,02	53,02	100,00	112.013.585.354	109.261.479.393	97,54	
	Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	3,73	3,72	99,73				
	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	75,45	78,98	104,68				
	Persentase Kelancaran Lalu Lintas	99,41	99,40	99,99				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			101,10				

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	66,11	66,69	100,88	7.318.470.270	7.219.676.026	98,65	
	Timbulan sampah terkelola	99	95,7	96,67				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				98,77	% Capaian Anggaran		98,65
Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	96,24	96,24	100,00	6.093.285.399	4.607.645.170	75,62	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				100,00	% Capaian Anggaran		75,62
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00	86,71	100,83	66.301.368.248	61.988.876.832	93,50	
	Nilai Indeks RB	70,01	76,49	109,26				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				105,04	% Capaian Anggaran		93,50
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	3,33	3,33	100,00	16.365.496.132	13.883.591.573	84,83	
	Indeks Profesionalitas ASN	59,73	41,49	69,46				
	Indeks SAKIP	63,00	62,29	98,87				
	Persentase implementasi rencana kelitbangan	100,00	100,00	100,00				
	Indeks Inovasi Daerah	58,00	53,33	91,95				
	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP						
	Indeks Integritas	75	74,33	99,11				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran							

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			% Efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	6,60	6,50	98,48	13.067.821.736	12.923.885.657	98,90	
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			98,48	% Capaian Anggaran		98,90	n/a
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	100,00	1.588.555.900	1.457.077.107	91,72	
	Indeks Risiko Bencana	120	155,47	77,19				
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran			88,59	% Capaian Anggaran		91,72	n/a
Rata-Rata Seluruh Capaian				107,61	416.876.278.676	399.887.211.328	94,53	
Tingkat Efisiensi								13,08

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja diperlukan untuk mengetahui *cost per outcome* atau anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja apakah kegiatan yang dilakukan dan menggunakan anggaran telah efektif sebagai pengungkit untuk mencapai kinerja. Dari table di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja *outcome* adalah sebesar **107,61%** dengan realisasi anggaran sebesar **94,53%**. Capaian kinerja tahun ini menunjukkan bahwa Kota Singkawang sudah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kinerja daerah.

2.3.8 Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

Pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPD dan Perjanjian Kinerja yang masuk dalam kategori **Berhasil** dan **Sangat Berhasil** adalah pencapaian pada sasaran :

1. Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kebudayaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten / Kota
 - kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
 - Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - b. Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Penyadaran, pemberdayaan dan

pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,

- Wirausaha muda pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

3. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :

- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

b. Perlindungan perempuan, dengan capaian 83,33% dilaksanakan dengan kegiatan :

- Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Rujukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

c. Peningkatan Kualitas Keluarga, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :

- Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

d. Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan capaian 136,46% dilaksanakan dengan kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

- e. Perlindungan khusus anak, dengan capaian 85,71% dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan Layanan Bagi Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Pengendalian penduduk, dengan capaian 95% dilaksanakan dengan kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
 - g. Pembinaan keluarga berencana (KB), dengan capaian 91,82% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - h. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - b. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan capaian 50% dilaksanakan dengan kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Ke anggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
 - d. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), dengan capaian 97.22% dilaksanakan dengan kegiatan

- Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
- e. Pengembangan UMKM, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
 - f. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - g. Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, dengan capaian 100%
 - h. Standarisasi dan perlindungan konsumen, dengan capaian 95,25% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
 - i. Peningkatan sarana distribusi perdagangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
 - j. Perencanaan dan pembangunan industri, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - k. Pengendalian Izin Usaha Industri, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - b. Pemasaran pariwisata, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
 - d. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
6. Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemberdayaan Sosial, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Rehabilitasi Sosial, dengan capaian 101,08% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
 - c. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan, dengan capaian 15,38% dilaksanakan dengan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

- d. Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan capaian 101,85% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pemeliharaan Anak Anak Terlantar
 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Penanganan Bencana, dengan capaian 117,75% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
7. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Perumahan dan kawasan permukiman kumuh, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan perumahan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - c. Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - d. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dengan capaian 416,67% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Kawasan permukiman, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)Ha

8. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan jalan, dengan capaian 117,23% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - c. Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, capaian 487,26% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengembangan Permukiman, dengan capaian 161,12% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Pengelolaan sumber daya air (SDA), dengan capaian 153,36% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) dalam satu area Kabupaten / Kota
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Penataan bangunan gedung, dengan capaian 130,28% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - g. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) , dengan capaian 99,81% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

- Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
 - Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- h. Pengelolaan penerbangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
9. Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan penataan ruang, dengan capaian 102,75% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penataan bangunan dan lingkungannya, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penyelesaian sengketa tanah garapan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah/ Kota.
 - d. Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - e. Program Pengelolaan Tanah Kosong, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong dan Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong
 - f. Pengelolaan izin membuka tanah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Kegiatan Penertiban Izin Membuka Tanah
 - g. Penatagunaan tanah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
10. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
 - Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
 - Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
 - b. Perekonomian dan Pembangunan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

- Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa
 - Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- c. Pendaftaran Penduduk, dengan capaian 140,26% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 - Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
 - Kegiatan Penataan Pendaftaran Penduduk
- d. Pencatatan Sipil, dengan capaian 172,28% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
- e. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
 - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- f. Pengelolaan Profil Kependudukan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyusunan Profil kependudukan
- g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dengan capaian 91,74% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 - Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik
 - Pembahasan KUA dan PPAS
 - Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
 - Pembahasan APBD
 - Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

- Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 - Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
 - Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - Pendalaman Tugas DPRD
 - Publikasi dan Dokumentasi Dewan
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
 - Penyusunan Program Kerja DPRD
 - Pelaksanaan Reses
 - Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
- h. Pembinaan perpustakaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- i. Pengelolaan arsip, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota dan Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
- j. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat kecamatan
- k. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Musrenbang Kecamatan dan Kelurahan
 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
- l. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Koordinasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah

m. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :

- Peningkatan Partisipasi Perayaan Hari Besar Nasional dan Daerah
- Pembinaan RT
- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Sedangkan pencapaian target kinerja sasaran strategis sesuai pada RPD dan Perjanjian Kinerja yang belum berhasil mencapai target adalah pada sasaran:

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan capaian 87,51% dilaksanakan dengan kegiatan :

- Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten Kota

b. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :

- Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

- Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dengan capaian 90,91% dilaksanakan dengan kegiatan
- Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten Kota
 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan pendidikan, dengan capaian 100,06% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Pengelolaan Pendidikan Non Formal
- b. Pengembangan kurikulum, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Penetapan Kurikulum Muata Lokal Pendidikan Dasar
 - Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

- c. Pendidik dan tenaga kependidikan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.
 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain.
 - b. Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengembangan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum
 - c. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota

- Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
- e. Penyuluhan pertanian, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
- f. Pengelolaan perikanan tangkap, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- g. Pengelolaan perikanan budidaya, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
- h. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- i. Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- j. Penanganan kerawanan pangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - k. Pengawasan Keamanan Pangan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
4. Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan
- a. Pengembangan iklim penanaman modal, dengan capaian 80% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - b. Promosi Penanaman Modal, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Pelayanan Penanaman Modal, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Penempatan Tenaga Kerja, dengan capaian 50% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota

- f. Hubungan Industrial, dengan capaian 50% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
- g. Perencanaan Tenaga Kerja, dengan capaian 50% dilaksanakan dengan kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
- h. Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan capaian 50% dilaksanakan dengan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
5. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- b. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
- c. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d. Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan capaian 100%.

- e. Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dengan capaian 92,91% dilaksanakan dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - f. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, dengan capaian 157% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
 - g. Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - h. Pengelolaan Persampahan, dengan capaian 179.14% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah serta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik, dengan capaian 41,09% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Aplikasi informatika, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
 - Pengelolaan Egovernment di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota

- c. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota
- d. Penyelenggaraan statistik sektoral, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten / Kota
- e. Kepegawaian daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Mutasi dan Promosi ASN
 - Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- f. Pengembangan sumber daya manusia, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pengembangan Kompetensi ASN
 - Pengembangan Kompetensi Teknis
 - Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
- g. Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
- h. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

- i. Penelitian dan pengembangan daerah, dengan capaian 99,07% dilaksanakan dengan kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bidang serta kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
 - j. Pengelolaan keuangan daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkung Keuangan Daerah
 - k. Pengelolaan barang milik daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan barang Milik Daerah
 - l. Pengelolaan pendapatan daerah, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - m. Penyelenggaraan pengawasan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal serta Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - n. Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi
7. Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 - b. Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, dengan capaian 37,44% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik

- c. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, dengan capaian 92,59% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - d. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 - e. Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, dengan capaian 98,68% dilaksanakan dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
8. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, capaian tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :
- a. Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Kegiatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - b. Penanggulangan bencana, dengan capaian 99,41% dilaksanakan dengan kegiatan :
 - Pelayanan Informasi rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

- c. Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, dengan capaian 100% dilaksanakan dengan kegiatan :
- Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.

2.3.9. Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja Kedepan

Sebagai upaya perbaikan kedepan akan dilakukan dan dirumuskan beberapa langkah penting dan strategis sebagai solusi bagi masalah yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan kinerja yang lebih baik, sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring dan evaluasi serta perbaikan secara berkala atas kinerja dan sistem kerja agar dapat dilakukan upaya perbaikan kinerja yang masih belum optimal serta sebagai bahan pertimbangan perencanaan pembangunan di masa mendatang;
2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran kinerja guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dan konsolidasi organisasi secara internal dalam rangka meningkatkan komitmen jajaran aparatur Pemerintah Kota Singkawang terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan pembangunan;
4. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus pelayan publik; dan
5. Melakukan inovasi sebagai upaya perbaikan pelayanan kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan.



WALI KOTA SINGKAWANG

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. SUMASTRO, M.Si
Jabatan : Pj. Wali Kota Singkawang

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2		4
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	73,25
2	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,27
		Angka Harapan Lama Sekolah	12,93
3	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	83,15
4	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	Persentase Partisipasi Atlet pada PorProv dan Popda	65,00
5	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan	53,25
		Skor tingkat Capaian Kota Layak Anak	685
		Laju Pertumbuhan Penduduk	1,65
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	Volume usaha koperasi	263.625.219.385
		Volume usaha UMKM	792.901.050.097
		Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	4,0
		Pertumbuhan PDRB sektor industri	4,60
7	Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	Distribusi PDRB sektor pertanian dan Perikanan	11,82
		Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	86,1
8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata	PAD sektor pariwisata	9,8
		Cakupan Pembinaan Ekonomi Kreatif	25
9	Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	69,41
		Persentase Penduduk Miskin	4,67
10	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang Tertangani	84
11	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	Cakupan Ketersediaan Rumah layak Huni	97,97
		Persentase Luasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Perkotaan	49,92
		Persentase penduduk berakses air minum	49,42
		Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	93,80
12	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	Persentase Jalan mantap	53,02
		Persentase Genangan/banjir Kota Singkawang	3,73
		Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik	75,45
		Persentase Kelancaran Lalu Lintas	99,41
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	Indeks kualitas Lingkungan Hidup	66,11
		Timbulan sampah terkelola	99
14	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	Ketaatan terhadap RTRW	96,24
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,00
		Nilai Indeks RB	70,01

16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks SPBE	3,33
		Indeks Profesionalitas ASN	59,73
		Indeks SAKIP	63,00
		Persentase implementasi rencana kelitbangan	25,00
		Indeks Inovasi Daerah	58,00
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
		Indeks Integritas	75
17	Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	Indeks Toleransi	6,60
18	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Ketentraman dan Ketertiban Umum	100
		Indeks Risiko Bencana	120

No	Sasaran / Program	Anggaran
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	48.526.507.162
	Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	45.271.707.562
	Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	379.376.200
	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	1.410.577.800
	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	1.464.845.600
2	Meningkatnya kualitas pendidikan	100.872.381.990
	Pengelolaan pendidikan	100.243.900.690
	Pengembangan kurikulum	38.520.800
	Pendidik dan tenaga kependidikan	589.960.500
3	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	2.125.278.800
	Pengembangan kebudayaan	1.987.926.500
	Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	137.352.300
4	Meningkatnya kualitas pemuda dan olahraga	1.454.994.107
	Pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	1.022.947.497
	Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	432.046.610
5	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan jumlah penduduk, peran aktif perempuan dan perlindungan anak dalam pembangunan daerah	4.240.474.550
	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	43.791.450
	Perlindungan perempuan	20.200.000
	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	107.370.000
	Perlindungan khusus anak	19.325.000
	Pengendalian penduduk	154.373.200
	Pembinaan keluarga berencana (kb)	3.027.814.900
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	867.600.000
6	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM	5.297.235.908
	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	95.157.800
	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	74.886.900
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	251.870.200
	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	62.529.000
	Pengembangan UMKM	1.758.088.401
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1.435.561.700
	Perizinan dan pendaftaran perusahaan	18.294.645
	Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	127.329.336
	Standarisasi dan perlindungan konsumen	95.982.700
	Peningkatan sarana distribusi perdagangan	1.055.263.826
	Perencanaan dan pembangunan industri	215.375.800
	Pengendalian Izin Usaha Industri	106.895.600

No	Sasaran / Program	Anggaran
7	Meningkatnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan Perikanan	7.872.600.490
	Penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	3.842.604.899
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	21.004.100
	Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	2.266.076.750
	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	173.498.900
	Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	388.602.400
	Penyuluhan pertanian	90.309.000
	Pengelolaan perikanan tangkap	240.261.755
	Pengelolaan perikanan budidaya	230.205.100
	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	67.600.136
	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	518.229.650
	Penanganan kerawanan pangan	17.120.000
	Pengawasan Keamanan Pangan	17.087.800
8	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	1.364.531.481
	Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	266.977.000
	Pemasaran pariwisata	635.763.000
	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	341.568.800
	Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	120.222.681
9	Meningkatnya iklim investasi PMA/PMDN di daerah untuk memperluas lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan	2.791.151.544
	Pengembangan iklim penanaman modal	231.546.000
	Promosi Penanaman Modal	200.000.000
	Pelayanan Penanaman Modal	700.122.044
	Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	6.025.000
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	406.900.000
	Penempatan Tenaga Kerja	1.019.709.300
	Hubungan Industrial	83.670.500
	Perencanaan Tenaga Kerja	24.999.300
	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	118.179.400
10	Meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	928.173.056
	Pemberdayaan Sosial	18.000.000
	Rehabilitasi Sosial	451.684.956
	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak kekerasan	7.350.000
	Perlindungan dan Jaminan Sosial	351.717.500
	Penanganan Bencana	99.420.600
11	Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar	18.654.366.549
	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	576.395.100
	Pengembangan perumahan	254.908.800
	Peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	5.135.002.200
	Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	6.274.276.199
	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	2.280.550.150
	Kawasan permukiman	4.133.234.100
12	Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi	83.823.445.239
	Penyelenggaraan jalan	47.214.018.728
	Pengembangan Jasa Konstruksi	58.567.800
	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	12.045.700.600
	Pengelolaan sumber daya air (sda)	3.723.000.000
	Penataan bangunan gedung	15.919.084.041
	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	4.713.074.070
	Pengelolaan penerbangan	150.000.000

No	Sasaran / Program	Anggaran
13	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan sampah yang dikelola	7.318.470.270
	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	234.873.400
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.909.462.750
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	17.605.400
	Perencanaan Lingkungan Hidup	384.706.600
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	46.486.000
	Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	8.000.200
	Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	10.836.200
	Pengelolaan Persampahan	4.706.499.720
14	Meningkatnya kualitas penataan ruang dan penataan bangunan	6.093.285.399
	Penyelenggaraan penataan ruang	1.959.666.100
	Penataan bangunan dan lingkungannya	1.142.080.000
	Penyelesaian sengketa tanah garapan	13.734.800
	Penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	2.069.891.800
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	8.185.900
	Pengelolaan izin membuka tanah	35.773.724
	Penatagunaan tanah	863.953.075
15	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	66.301.368.248
	Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	32.588.066.276
	Perekonomian dan Pembangunan	1.394.837.408
	Pendaftaran Penduduk	477.978.656
	Pencatatan Sipil	142.627.050
	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	136.984.600
	Pengelolaan Profil Kependudukan	7.704.500
	Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	12.022.761.000
	Pembinaan perpustakaan	10.939.241.779
	Pengelolaan arsip	58.510.700
	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2.396.755.894
	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5.839.258.223
	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	204.018.952
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	92.623.210
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan penyelenggaraan pemerintah daerah	16.365.496.132
	Pengelolaan Informasi dan komunikasi publik	633.806.900
	Pengelolaan Aplikasi informatika	1.077.574.836
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	52.810.075
	Penyelenggaraan statistik sektoral	169.045.400
	Kepegawaian daerah	1.970.527.000
	Pengembangan sumber daya manusia	1.951.526.170
	Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	389.992.396
	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	211.163.000
	Penelitian dan pengembangan daerah	468.668.202
	Pengelolaan keuangan daerah	4.292.084.528
	Pengelolaan barang milik daerah	735.040.150
	Pengelolaan pendapatan daerah	2.495.049.247
	Penyelenggaraan pengawasan	1.665.495.228
	Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	252.713.000

No	Sasaran / Program	Anggaran
17	Meningkatnya pemahaman terhadap kesatuan bangsa dan politik	13.067.821.736
	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	336.652.584
	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	12.463.766.540
	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	60.000.300
	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	85.780.952
	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	121.621.360
18	Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum	1.588.555.900
	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	261.040.800
	Penanggulangan bencana	1.232.000.600
	Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	95.514.500

Singkawang, 16 Oktober 2023

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,



SUMASTRO